



**PUTUSAN  
Nomor 4008/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1310/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT CIPTA KRIDATAMA**, beralamat di Gedung TMT 2, 3<sup>rd</sup> Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, RT 001, RW 005, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, 12560, yang diwakili oleh Irfan Setiaputra, Jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90508/PP/M.VA/15/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh alasan permohonan banding dari Pemohon Banding sehingga jumlah Rugi Fiskal menjadi sebagai berikut:

Peredaran Usaha	US\$ 333,499,000.00
Harga Pokok Penjualan	US\$ 247,329,945.00
Laba Bruto	US\$ 86,169,055.00
Biaya Usaha	US\$ 56,148,846.00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	US\$ 30,020,209.00
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	
Penghasilan dari Luar Usaha	(US\$ 10,309,339.00)
Penghasilan yang dikenakan PPh Final	(US\$ 4,913,920.00)
Penyesuaian Fiskal	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	US\$ 30,107,448.00
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	US\$ 45,454,468.00
c. Jumlah	(US\$ 15,347,020.00)
Jumlah Penghasilan Neto (Rugi Fiskal)	(US\$ 550,071.00)
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal)	(US\$ 550,071.00)
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	0
Kredit Pajak	(US\$ 6,696,388.86)
Jumlah PPh lebih dibayar	(US\$ 6,696,388.86)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90508/PP/M.VA/15/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00408/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00031/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015 atas nama PT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0-091.000, beralamat di Gedung TMT 2, 3<sup>rd</sup> Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta, 12560, sehingga PPh yang kurang/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah (USD)
1	Peredaran Usaha	333,499,000.00
2	Harga Pokok Penjualan	247,329,945.00
3	Laba Bruto dari Usaha	86,169,055.00
4	Biaya Usaha	56,148,847.00
5	Penghasilan Neto dari Usaha	30,020,208.00
6	Penghasilan Neto dari Luar Usaha	(10,309,339.00)
7	Penghasilan Neto Komersial	19,710,869.00
8	Penyesuaian Fiskal	(19,694,457.00)
	1.Penyesuaian Fiskal Positif	30,674,025.77
	2.Penyesuaian Fiskal Negatif	(50,368,388.00)
9	Penghasilan Neto Fiskal	16,506.77
10	Kompensasi Kerugian	-
11	Penghasilan Kena Pajak	16,506.77
12	PPH Terutang	4,126.69
13	Kredit Pajak	6,696,388.86
14	PPH Kurang/(Lebih) dibayar	(6,692,262.17)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Maret 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90508/PP/M.VA/15/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90508/PP/M.VA/15/2017 tanggal 18 Desember 2017 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00408/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00031/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015 atas nama PT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0-091.000, beralamat di Gedung TMT 2, 3<sup>rd</sup> Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta, 12560, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4008/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00408/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00031/406/13/091/15 tanggal 28 April 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.797.267.0-091.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD 6,692,262.17; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2013 Atas Penyesuaian Fiskal Positif yang Terdiri dari:

1. Koreksi Positif 7202015000 - *GA Drink & Canteen* berupa *Dinner Farewell* sebesar USD 4.530.00;
2. Koreksi Positif 7245007000 - *GA Sport Recreation* berupa Perbaikan Sound dan sejenisnya sebesar USD 198.00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan



menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Atas Penghasilan *Netto* Tahun Pajak 2013 Atas Penyesuaian Fiskal Positif yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh fasilitas perpajakan yaitu Surat Keputusan Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu (SKPPDT) maka untuk sebagian sepanjang *in casu* telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf e serta Pasal Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 6 ayat (4) dan (5) PMK-05/02/PMK.03/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 6,692,262.17; dengan perincian sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah (USD)
1	Peredaran Usaha	333,499,000.00
2	Harga Pokok Penjualan	247,329,945.00
3	Laba Bruto dari Usaha	86,169,055.00
4	Biaya Usaha	56,148,847.00
5	Penghasilan Neto dari Usaha	30,020,208.00
6	Penghasilan Neto dari Luar Usaha	(10,309,339.00)
7	Penghasilan Neto Komersial	19,710,869.00
8	Penyesuaian Fiskal	(19,694,457.00)
	1. Penyesuaian Fiskal Positif	30,674,025.77
	2. Penyesuaian Fiskal Negatif	(50,368,388.00)
9	Penghasilan Neto Fiskal	16,506.77
10	Kompensasi Kerugian	-
11	Penghasilan Kena Pajak	16,506.77
12	PPH Terutang	4,126.69
13	Kredit Pajak	6,696,388.86
14	PPH Kurang/(Lebih) dibayar	(6,692,262.17)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |           |                     |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai         | Rp        | 6.000,00            |
| 2. Redaksi         | Rp        | 10.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp</u> | <u>2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp        | 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4008/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4008/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)